



Konsolidasi Oligarki Politik dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Analisis Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024

Didi Suheri

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama, Indonesia

Penulis Korespondensi: didi.suheri@satyagama.ac.id

Abstract. *The 2024 Indonesian Presidential Election represented an important moment in the development of Indonesian democracy, occurring amid the increasing consolidation of political and economic elites. This condition raises questions regarding the influence of oligarchic practices on electoral democracy in Indonesia. This study aims to analyze the mechanisms of political oligarchic consolidation behind the electoral victory of the Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka ticket in the 2024 Presidential Election using Jeffrey A. Winters' theory of oligarchy. This research applies a qualitative approach with a case study method. Data were collected through document analysis and library research involving official documents, institutional reports, academic publications, and relevant literature. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Prabowo–Gibran victory was influenced by political elite consolidation, economic elite support, extensive coalitions, and power networks that enabled wealth-holding groups to maintain their interests through democratic mechanisms. The study confirms that oligarchy in Indonesia has adapted to democratic institutions while maintaining electoral legitimacy and contributes to understanding the relationship between electoral democracy and political power consolidation.*

Keywords: 2024 Indonesian Presidential Election; Electoral Democracy; Elite Consolidation; Jeffrey A. Winters; Political Oligarchy.

Abstrak. Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, yang berlangsung di tengah semakin kuatnya konsolidasi elite politik dan ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik oligarki memengaruhi dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi oligarki politik yang melatarbelakangi kemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 dengan menggunakan perspektif teori oligarki Jeffrey A. Winters. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, laporan lembaga negara, publikasi akademik, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo–Gibran dipengaruhi oleh konsolidasi elite politik, dukungan elite ekonomi, pembentukan koalisi yang luas, serta jaringan kekuasaan yang memungkinkan kelompok pemilik kekayaan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa oligarki di Indonesia mampu beradaptasi dengan institusi demokrasi tanpa menghilangkan legitimasi elektoral, serta memberikan pemahaman mengenai hubungan antara demokrasi elektoral dan konsolidasi kekuasaan politik.

Kata kunci: Demokrasi Elektoral; Konsolidasi Elite; Oligarki Politik; Pemilihan Presiden Indonesia 2024; Jeffrey A. Winters.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pergantian kekuasaan secara konstitusional. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilu secara berkala, melainkan juga oleh sejauh mana proses politik berlangsung secara adil, kompetitif, dan bebas dari dominasi kelompok elite. Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2024 menjadi momentum penting yang memperlihatkan keberlanjutan demokrasi elektoral sekaligus

memunculkan berbagai persoalan mengenai menguatnya pengaruh elite politik dan ekonomi dalam proses kontestasi.

Menurut teori oligarki Winters, demokrasi tidak serta-merta menghilangkan dominasi kelompok kaya, melainkan dapat menjadi sarana bagi oligark untuk mempertahankan kepentingannya melalui pendanaan politik, koalisi elite, penguasaan media, dan pengaruh terhadap institusi negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pascareformasi, oligarki di Indonesia tidak melemah, tetapi bertransformasi melalui partai politik, jaringan bisnis, dan birokrasi sehingga memperkuat konsolidasi elite dalam demokrasi elektoral (Jebabun, 2024)

Fenomena tersebut semakin terlihat pada Pemilu Presiden 2024 yang ditandai dengan tingginya biaya politik, besarnya koalisi partai pendukung, dukungan pemilik modal, serta polemik mengenai politik dinasti dan independensi lembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan politik tidak hanya didasarkan pada gagasan dan program, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara elite politik dan elite ekonomi.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai oligarki, biaya politik, politik dinasti, dan oligarki media, kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme konsolidasi oligarki dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme konsolidasi oligarki politik dalam kemenangan pasangan tersebut melalui perspektif teori oligarki Winters serta menjelaskan implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia (Noor & Hidayaturrehman 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori oligarki Winters

Oligark didefinisikan sebagai aktor dengan kekayaan material besar yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan, lewat konsep *wealth defense*. Winters membedakan beberapa tipe oligarki, dan mengkategorikan Indonesia pascareformasi sebagai *civil oligarchy* tidak berkuasa langsung, tetapi bekerja lewat mekanisme demokrasi sah (pendanaan kampanye, koalisi politik, penguasaan media, jejaring partai/birokrasi) (Noor & Hidayaturrehman, 2025).

Demokratisasi dan *elite pascareformasi*

Beberapa peneliti (Hadiz et al.,) menunjukkan pola yang sama: demokratisasi tidak menghilangkan kekuatan elite lama, melainkan membuka ruang adaptasi mereka melalui partai, jaringan bisnis, dan klientelisme politik. Prosedur demokrasi tetap berjalan, tapi substansinya dikendalikan segelintir kelompok berkuasa (Atthahara et al., 2025).

Biaya politik, dana kampanye, dan dinasti politik

Penelitian terbaru (Rohmah et al.) menyoroti tingginya biaya politik yang berkelindan dengan dinasti politik dan korupsi, lemahnya pengawasan dana kampanye Pemilu 2024, serta keterlibatan pengusaha besar dalam mendukung pasangan Prabowo–Gibran. Kontroversi pencalonan Gibran (terkait putusan MK soal syarat usia cawapres) menjadi contoh bagaimana institusi hukum dimanfaatkan elite untuk kepentingan kekuasaan (Idris et al., 2026).

Kebaruan penelitian

Studi-studi sebelumnya cenderung membahas oligarki, biaya politik, dan dinasti politik secara terpisah dan pada level struktural jangka panjang. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan teori Winters dan data empiris untuk menganalisis satu peristiwa elektoral spesifik: kemenangan Prabowo–Gibran di Pilpres 2024.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam mekanisme konsolidasi oligarki politik dalam Pemilu Presiden 2024, dengan fokus pada kemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi dari dinamika tersebut. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana interaksi antaraktor politik dan ekonomi berlangsung dalam satu peristiwa elektoral yang spesifik dan kontemporer. Data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen koalisi partai politik, laporan dana kampanye, serta berbagai kebijakan pemerintah yang relevan. Adapun data sekunder dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, penelitian terdahulu, laporan lembaga independen, serta pemberitaan media yang kredibel.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengungkap fakta-fakta empiris mengenai relasi antaraktor dalam proses politik, sementara studi kepustakaan digunakan untuk membangun landasan teoretis, khususnya yang berkaitan dengan teori oligarki, demokrasi elektoral, dan relasi antara negara dan kapital. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. yang terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses interpretasi data dilakukan dengan menggunakan teori oligarki Jeffrey A. Winters sebagai kerangka analitis utama (Situmeang et al., 2026).

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai dokumen, penelitian terdahulu, publikasi akademik, laporan lembaga independen, serta pemberitaan media. Selain itu, dilakukan pula interpretasi secara berulang guna meminimalkan subjektivitas peneliti dalam proses analisis. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara kekuatan ekonomi, elite politik, dan institusi demokrasi membentuk suatu konfigurasi kekuasaan tertentu dalam konteks Pemilu Presiden 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu Presiden 2024 tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin nasional, tetapi juga mencerminkan konsolidasi elite politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dengan 58,58% suara menunjukkan bahwa keberhasilan elektoral tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi pemilih, tetapi juga oleh dukungan koalisi elite politik, ekonomi, dan kelembagaan. Menurut Winters (2011), oligarki dalam demokrasi modern bekerja melalui kemampuan elite mempertahankan kepentingan ekonomi dengan memengaruhi proses politik (Independent, 2026).

Data resmi rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkuat gambaran kemenangan tersebut sekaligus menjadi data pendukung bagi analisis konsolidasi elite di atas, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Resmi Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar	40.971.906	24,95%
2	Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka	96.214.691	58,59%
3	Ganjar Pranowo–Mahfud MD	27.040.878	16,47%
	Total Suara Sah Nasional	164.227.475	100%

Sumber: KPU RI, Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (dikutip dalam Kompas.tv, 20 Maret 2024; Rumah Pemilu, 2024).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo–Gibran unggul di 36 dari 38 provinsi dengan selisih lebih dari 30 poin persentase dari pesaing terdekat, sehingga Pemilu Presiden 2024 terselenggara dalam satu putaran. Besarnya margin kemenangan ini konsisten dengan argumen bahwa dukungan koalisi elite politik-ekonomi yang luas memberikan keunggulan struktural bagi pasangan calon yang didukungnya, sebagaimana ditunjukkan pada data koalisi dan pembiayaan kampanye berikut (Cover 2026).

Terbentuknya koalisi besar yang didukung mayoritas partai politik mencerminkan upaya elite mengurangi ketidakpastian politik, menjaga stabilitas kekuasaan, serta mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Koalisi tersebut lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada kesamaan ideologi, sejalan dengan pandangan Hadiz (2004) bahwa demokratisasi di Indonesia tidak menghapus dominasi elite, melainkan memberi ruang baru bagi mereka untuk beradaptasi.

Konsolidasi elite juga terlihat melalui hubungan erat antara partai politik, birokrasi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan relawan yang membentuk jaringan kekuasaan. Selain itu, kontroversi pencalonan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bagaimana institusi demokrasi menjadi arena pengaruh elite politik. Setelah pemilu, bergabungnya berbagai kelompok politik ke dalam pemerintahan semakin memperlihatkan kecenderungan elite mengutamakan akses terhadap kekuasaan dibandingkan fungsi oposisi (Widiyahseno et al., 2026).

Meski demikian, kemenangan Prabowo-Gibran tidak hanya ditentukan oleh konsolidasi elite. Faktor seperti preferensi pemilih, kepuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, strategi kampanye, popularitas kandidat, serta kondisi sosial dan budaya juga berperan. Secara keseluruhan, perspektif Winters menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia tidak melemah dalam demokrasi, melainkan bertransformasi melalui mekanisme elektoral yang sah, sehingga demokrasi dan oligarki berkembang secara adaptif dalam konfigurasi politik nasional.

Dukungan Elite Ekonomi sebagai Instrumen Wealth Defense

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan elite ekonomi dalam Pemilu Presiden 2024 semakin menguat, menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia. Dukungan sejumlah pengusaha nasional kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipahami, menurut teori oligarki Winters, sebagai praktik wealth defense, yaitu strategi kelompok pemilik modal untuk melindungi dan memperluas kekayaan melalui pengaruh terhadap proses politik (Siddha, 2024).

Winters menjelaskan bahwa kekayaan dapat dikonversi menjadi pengaruh politik melalui pembiayaan kampanye, pembangunan jaringan elite, penguasaan media, dan dukungan kepada kandidat yang dinilai mampu menjaga stabilitas kepentingan bisnis. Dukungan tokoh-tokoh bisnis nasional kepada Prabowo-Gibran mencerminkan investasi politik guna mengurangi ketidakpastian kebijakan dan mempertahankan akses terhadap pusat-pusat kekuasaan. Tingginya biaya politik dalam pemilu semakin memperkuat posisi elite ekonomi karena kandidat membutuhkan dukungan finansial yang besar, sehingga tercipta hubungan saling membutuhkan antara elite politik dan pemilik modal. Namun, dukungan tersebut bukan

satu-satunya faktor penentu kemenangan, karena legitimasi tetap ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keterlibatan pengusaha dalam politik tidak selalu identik dengan praktik oligarki. Fokus teori Winters adalah pada kemampuan kelompok kaya memperoleh pengaruh politik yang tidak proporsional akibat konsentrasi kekayaan. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa demokrasi pascareformasi tidak menghilangkan oligarki, tetapi menyediakan mekanisme baru bagi elite ekonomi untuk mempertahankan dan memperluas kepentingannya melalui jejaring politik yang sah secara konstitusional (Asetya, 2026).

Sebagai data pendukung, laporan resmi dana kampanye yang diaudit KPU serta penelusuran sejumlah lembaga pemantau menunjukkan pola keterlibatan elite ekonomi sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.

No. Urut	Pasangan Calon	Penerimaan Dana Kampanye	Pengeluaran Dana Kampanye
1	Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar	Rp49,34 miliar	Rp49,34 miliar
2	Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka	Rp208,20 miliar	Rp207,58 miliar
3	Ganjar Pranowo–Mahfud MD	Rp506,89 miliar	Rp506,89 miliar

Sumber: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) KPU RI per 29 Februari 2024, sebagaimana dilaporkan Kompas.id (2024) dan Indonesiabaik.id (2024).

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun dana kampanye resmi pasangan Prabowo–Gibran tidak menjadi yang tertinggi, sumber pendanaan tersebut sebagian besar berasal dari sumbangan partai politik dan pihak swasta (perusahaan/badan usaha nonpemerintah) dengan nilai maksimal Rp25 miliar per entitas sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan keterlibatan aktif jejaring pemilik modal dalam mendanai konsolidasi elite politik, sejalan dengan konsep wealth defense Winters.

Tabel 3. Contoh Tokoh Pengusaha dalam Jejaring Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran.

Nama	Afiliasi Usaha	Peran dalam TKN
Aburizal Bakrie	Bakrie Group (energi, tambang, properti)	Dewan Pembina TKN
Hashim Djojohadikusumo	Arsari Group (agribisnis, tambang)	Ketua Dewan Pengarah TKN
Rosan P. Roeslani	Pengusaha; Rajawali Corpora	Ketua TKN
Garibaldi “Boy” Thohir	Adaro Energy (tambang batu bara)	Pendukung/relawan terbuka
Erwin Aksa	Bosowa Group	Ketua Umum HIPMI/anggota TKN
Pandu Sjahrir	Sektor tambang dan startup digital	Anggota TKN

Wishnu Wardhana

Teladan Resources (sawit, batu bara)

Pendukung

Sumber: diolah dari *CNN Indonesia* (2023), *CNBC Indonesia* (2024), *Liputan6.com* (2023), dan *Jaring.id* (2026).

Sejalan dengan data tersebut, penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat sedikitnya 22 pengusaha yang berafiliasi dengan usaha pertambangan berada dalam lingkaran TKN dan pendukung Prabowo–Gibran, jumlah tertinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya pada Pemilu 2024 (Suara.com, 2024). Temuan ini memperkuat data pendukung bahwa keterlibatan elite ekonomi, khususnya dari sektor ekstraktif, merupakan bagian signifikan dari konsolidasi dukungan terhadap pasangan pemenang, sebagaimana diprediksi oleh kerangka *wealth defense* Winters.

Koalisi Besar dan Rekonfigurasi Kekuasaan

Salah Pemilu Presiden 2024 ditandai oleh terbentuknya koalisi politik besar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dukungan mayoritas partai politik menunjukkan bahwa kontestasi tidak hanya berupa persaingan antar kandidat, tetapi juga merupakan proses rekonfigurasi kekuasaan di tingkat elite untuk membangun stabilitas pemerintahan dan mengamankan posisi politik pasca-Pemilu (Sherillia et al., 2026).

Menurut Winters, koalisi besar merupakan bentuk adaptasi oligarki dalam demokrasi, di mana elite politik dan ekonomi membangun konsensus guna mengurangi ketidakpastian politik serta menjaga keberlanjutan kepentingan dan distribusi kekuasaan. Koalisi tidak lagi didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan pada kepentingan pragmatis memperoleh akses terhadap pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan Robison & Hadiz yang menyatakan bahwa demokrasi pascareformasi membuka ruang bagi aliansi baru antara elite politik dan ekonomi.

Setelah pemilu, kecenderungan bergabungnya aktor politik di luar koalisi ke dalam pemerintahan menunjukkan bahwa integrasi elite lebih dominan daripada pembentukan oposisi yang kuat. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi *checks and balances*, meskipun dalam sistem presidensial multipartai koalisi tetap diperlukan untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Secara keseluruhan, koalisi besar pada Pemilu 2024 mencerminkan rekonfigurasi kekuasaan yang memperkuat hubungan antara elite politik, partai, dan kelompok berkepentingan. Dalam perspektif Winters, fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak menghilangkan oligarki, tetapi menjadi sarana baru bagi elite untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui mekanisme yang sah secara konstitusional (Hidayat et al., 2026).

Data pendukung mengenai perkembangan koalisi di parlemen memperjelas pola rekonfigurasi kekuasaan yang dimaksud, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Komposisi Kursi DPR RI Partai Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran.

Fase	Partai Koalisi	Jumlah/Persentase Kursi DPR	Keterangan
Masa pencalonan (Koalisi Indonesia Maju, Okt 2023)	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda	±261 dari 575 kursi DPR periode 2019–2024	Memenuhi presidential threshold 20% kursi DPR
Pascapelantikan awal (April 2024)	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat	280 dari 580 kursi DPR periode 2024–2029 (±48%)	PKB, NasDem, PKS, PDIP belum resmi bergabung
Pascabergabungnya PKB, NasDem, PKS (Okt 2024)	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, PKS	±470 dari 580 kursi DPR (81%)	Hanya PDIP (110 kursi/19%) di luar koalisi pemerintah

Sumber: diolah dari CNN Indonesia (2023, 2024), CNBC Indonesia (2023), Wikipedia Koalisi Indonesia Maju (2024), dan Kompas.id (2024).

Data pada Tabel 4 menunjukkan lonjakan penguasaan kursi parlemen dari sekitar 48% pascapelantikan menjadi 81% dalam waktu kurang dari enam bulan setelah bergabungnya PKB, NasDem, dan PKS. Pola ini menjadi data pendukung empiris bagi argumen bahwa koalisi besar pada Pemilu 2024 tidak semata dibentuk untuk memenangkan kontestasi elektoral, tetapi juga untuk mengonsolidasikan kekuasaan pascapemilu dan meminimalkan ruang oposisi, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan implikasi terhadap checks and balances berikut ini.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa menguatnya konsolidasi elite politik dan keterlibatan elite ekonomi dalam Pemilu Presiden 2024 membawa implikasi yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Demokrasi elektoral pada dasarnya dirancang untuk menjamin kompetisi politik yang terbuka, partisipatif, dan setara bagi seluruh warga negara. Namun ketika kompetisi politik semakin dipengaruhi oleh konsentrasi sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan elite, kualitas demokrasi tidak lagi cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut berlangsung secara adil dan kompetitif.

Merujuk pada perspektif Winters (2011), demokrasi dan oligarki sesungguhnya bukan dua hal yang saling meniadakan. Demokrasi tetap dapat berjalan melalui mekanisme pemilu yang bebas dan konstitusional, sementara oligarki beroperasi melalui kemampuan kelompok kaya memengaruhi proses politik tanpa perlu menguasai institusi negara secara langsung. Pola ini terbukti masih relevan dalam konteks Indonesia kontemporer. Konsolidasi kekuatan elite politik, dukungan kelompok pemilik modal, serta pembentukan koalisi besar dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pengaruh oligarki lebih banyak bekerja melalui mekanisme demokrasi itu sendiri, bukan di luar sistemnya (Widiyahseno et al., 2026).

Kondisi tersebut membawa sejumlah implikasi. Implikasi pertama adalah meningkatnya ketimpangan akses terhadap kompetisi politik. Kontestasi elektoral yang menuntut biaya politik sangat tinggi menyebabkan kandidat dengan dukungan finansial, jaringan elite, dan akses sumber daya ekonomi yang kuat memiliki peluang jauh lebih besar untuk memenangkan pemilu. Sebaliknya, kandidat yang memiliki kapasitas kepemimpinan namun minim dukungan politik dan ekonomi akan menghadapi hambatan yang jauh lebih berat dalam bersaing. Kondisi ini berpotensi mengikis prinsip kesetaraan politik (*political equality*) yang menjadi salah satu fondasi utama demokrasi.

Implikasi kedua berkaitan dengan melemahnya fungsi representasi partai politik. Pembentukan koalisi dalam Pemilu 2024 tampak lebih banyak didasarkan pada kalkulasi elektoral dan distribusi kekuasaan, alih-alih diferensiasi ideologi maupun program kebijakan. Akibatnya, partai politik berisiko lebih berorientasi pada kepentingan elite dibandingkan menjalankan fungsi representasi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi, sekaligus mempersempit ruang kompetisi kebijakan antaraktor politik. Implikasi ketiga menyangkut efektivitas mekanisme checks and balances. Bergabungnya sebagian besar kekuatan politik ke dalam koalisi pemerintahan memang dapat meningkatkan stabilitas politik dan mempermudah pengambilan keputusan. Namun, dominasi koalisi yang terlalu besar juga berpotensi melemahkan kapasitas oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah—padahal oposisi yang kuat merupakan prasyarat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Meski demikian, penelitian ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semata-mata ditentukan oleh praktik oligarki. Hasil Pemilu 2024 tetap merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi jutaan pemilih, di mana faktor-faktor seperti elektabilitas kandidat, efektivitas strategi kampanye, dukungan partai, kepuasan publik terhadap pemerintahan sebelumnya, serta preferensi politik masyarakat tetap memiliki kontribusi penting. Oleh karena itu, oligarki dalam penelitian ini dipahami sebagai salah satu faktor struktural yang memengaruhi konfigurasi kompetisi politik, bukan sebagai satu-satunya determinan kemenangan elektoral (Politik, 2026).

Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini bukan terletak pada keberlangsungan pemilu sebagai prosedur konstitusional, melainkan pada upaya memperkuat kualitas demokrasi substantif. Reformasi sistem pembiayaan politik, peningkatan transparansi dana kampanye, penguatan demokrasi internal partai, serta penegakan

independensi lembaga-lembaga negara menjadi agenda penting agar proses demokrasi tetap berlangsung secara kompetitif, akuntabel, dan inklusif-sehingga kekuasaan negara benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik, bukan sekadar mempertahankan konfigurasi kepentingan elite.

Secara teoretis, berdasarkan perspektif oligarki Winters, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia tengah menghadapi proses adaptasi oligarki yang semakin kompleks. Oligarki tidak lagi beroperasi melalui kontrol langsung terhadap negara sebagaimana pada rezim otoriter, melainkan melalui jaringan kekuasaan yang menghubungkan elite politik, elite ekonomi, partai politik, dan institusi demokrasi. Dengan demikian, konsolidasi kekuasaan dalam Pemilu Presiden 2024 bukan sekadar fenomena politik jangka pendek, melainkan bagian dari dinamika transformasi hubungan antara demokrasi dan oligarki dalam perjalanan politik Indonesia kontemporer (Jend & Subroto, 2021).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian oligarki politik dalam demokrasi elektoral Indonesia melalui reinterpretasi teori oligarki Jeffrey dalam konteks Pemilu Presiden 2024. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang memposisikan oligarki sebagai fenomena struktural yang berkaitan dengan dominasi elite ekonomi pascareformasi, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik oligarki kini berkembang dalam bentuk yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan mekanisme demokrasi elektoral. Dengan demikian, oligarki tidak lagi dipahami sebagai kekuatan yang bekerja di luar sistem demokrasi, melainkan sebagai bagian dari dinamika internal demokrasi yang memanfaatkan institusi politik untuk mempertahankan dan memperluas kepentingannya.

Dalam teori Winters, konsep *wealth defense* menjelaskan bahwa tujuan utama oligark adalah mempertahankan dan melindungi akumulasi kekayaan melalui penguasaan atau pengaruh terhadap institusi politik. Temuan penelitian ini mengonfirmasi relevansi konsep tersebut dalam konteks Indonesia, namun sekaligus memperluas pemahamannya. Mekanisme *wealth defense* pada Pemilu Presiden 2024 tidak hanya dijalankan melalui dukungan finansial kepada kandidat politik, tetapi juga melalui pembentukan jaringan kekuasaan (*power networks*) yang menghubungkan elite ekonomi, elite politik, partai politik, serta institusi demokrasi dalam satu konfigurasi yang saling menguntungkan (Indrawan et al., 2025).

Penelitian ini menemukan bahwa konsolidasi oligarki tidak bekerja secara linear, melainkan melalui interaksi berbagai aktor dan institusi yang saling memperkuat satu sama lain. Dukungan elite ekonomi menyediakan sumber daya finansial dan jaringan bisnis, sementara elite politik menyediakan akses terhadap proses pengambilan keputusan dan legitimasi kekuasaan melalui mekanisme elektoral. Partai politik berfungsi sebagai institusi

yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan kompetisi politik, sedangkan institusi demokrasi menyediakan arena formal yang memberikan legitimasi terhadap proses tersebut. Dengan kata lain, praktik oligarki dalam Pemilu Presiden 2024 tidak hanya ditopang oleh besarnya konsentrasi modal, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi strategis antarelite dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu model konseptual mengenai konsolidasi oligarki politik dalam demokrasi elektoral. Model ini menjelaskan bahwa konsolidasi oligarki pada Pemilu Presiden 2024 berlangsung melalui empat elemen yang saling berkaitan, yaitu: pertama, konsolidasi elite politik melalui pembentukan koalisi besar; kedua, dukungan elite ekonomi sebagai instrumen *wealth defense*; ketiga, integrasi kepentingan politik dan ekonomi melalui jejaring kekuasaan; dan keempat, pemanfaatan institusi demokrasi sebagai mekanisme legitimasi politik. Keempat elemen tersebut membentuk konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan oligarki beradaptasi tanpa harus menghilangkan prosedur demokrasi yang berlangsung secara formal (Rohmah, 2024).

Model konseptual ini memperluas argumentasi Winters mengenai hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Jika Winters lebih menekankan kemampuan oligark dalam mempertahankan kekayaan melalui pengaruh terhadap institusi politik, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer, proses tersebut berlangsung melalui mekanisme yang lebih kompleks, yakni melalui konsolidasi antarelite yang melibatkan aktor politik, pelaku usaha, partai politik, dan institusi negara secara bersamaan. Dengan demikian, praktik *wealth defense* tidak hanya berlangsung melalui hubungan bilateral antara pengusaha dan penguasa, tetapi berkembang menjadi suatu ekosistem politik yang memungkinkan kepentingan ekonomi dan politik saling terintegrasi dalam proses demokrasi elektoral.

Selain memperkaya teori oligarki, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap kajian demokrasi elektoral di Indonesia. Selama ini, kualitas demokrasi umumnya diukur melalui indikator prosedural, seperti penyelenggaraan pemilu yang bebas, kompetitif, dan periodik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi juga perlu dianalisis melalui distribusi akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Demokrasi yang secara prosedural berjalan dengan baik belum tentu menghasilkan kompetisi politik yang setara apabila terdapat konsentrasi sumber daya yang memungkinkan kelompok tertentu memiliki pengaruh politik yang jauh lebih besar dibandingkan aktor lainnya. Oleh karena itu, analisis mengenai demokrasi elektoral perlu mempertimbangkan hubungan antara distribusi kekayaan,

konfigurasi elite, dan struktur kekuasaan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kualitas demokrasi substantif (Margiansyah, 2024).

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara demokrasi dan oligarki di Indonesia tidak bersifat antagonistik, tetapi adaptif. Demokrasi menyediakan mekanisme legitimasi melalui pemilu, sedangkan oligarki memanfaatkan mekanisme tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya melalui konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia bukan hanya menjaga keberlangsungan pemilu sebagai prosedur konstitusional, tetapi juga memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara kompetitif, inklusif, dan tidak didominasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki konsentrasi kekayaan dan akses kekuasaan yang berlebihan.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa konsolidasi oligarki dalam demokrasi elektoral Indonesia merupakan hasil interaksi simultan antara kekuatan ekonomi, konfigurasi elite politik, koalisi partai, dan institusi demokrasi. Perspektif tersebut tidak hanya memperkaya penerapan teori oligarki Winters dalam konteks Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara demokrasi dan oligarki pada berbagai kontestasi politik di negara-negara demokrasi berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024 tidak hanya dipengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi dalam demokrasi Indonesia. Berdasarkan teori oligarki Jeffrey A. Winters, praktik oligarki berlangsung secara adaptif melalui mekanisme konstitusional, seperti pembentukan koalisi politik, dukungan elite ekonomi, pembiayaan politik, dan jejaring kekuasaan antara aktor politik, partai, serta pemilik modal. Tingginya biaya politik dan dominasi koalisi besar memperlihatkan eratnya hubungan antara kekuatan politik dan modal, meskipun legitimasi kemenangan tetap diperoleh melalui mekanisme pemilu yang demokratis.

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan teori oligarki Winters dengan menunjukkan bahwa mekanisme *wealth defense* berlangsung melalui konsolidasi elite politik, dukungan elite ekonomi, pembentukan koalisi besar, dan pemanfaatan institusi demokrasi sebagai sumber legitimasi. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai adaptasi oligarki

dalam demokrasi elektoral dan relevan untuk menjelaskan dinamika kekuasaan di negara berkembang.

Secara praktis, penelitian menekankan pentingnya reformasi pembiayaan politik, transparansi dana kampanye, penguatan demokrasi internal partai, serta independensi lembaga demokrasi guna menciptakan kompetisi politik yang lebih adil, kompetitif, dan akuntabel. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kasus Pemilu Presiden 2024 dan mengandalkan data sekunder. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods dengan memanfaatkan data primer agar hubungan antara elite politik, elite ekonomi, dan demokrasi dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Asetya, D. R. (2026). Institutional transformation and governance in Indonesia: Democracy, decentralization, and the persistence of oligarchy, *1*(1), 0–9.
- Atthahara, H., Rizki, M. F., Nayiroh, L., & Widyodaru, N. (2025). How patronage and clientelism works in village head elections in Karawang Regency, Indonesia?, *15*(2), 399–415. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i2.17044>
- Hidayat, R., Ayodya, P., Husni, M., & Patrissia, R. U. (2026). The techno-oligarchic communication paradox: Corporate media effects and democratic deficit in Indonesian political parties, *4*(2), 216–228. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i2.842>
- Idris, U., Dugis, V. M. A., & Koesbardiati, T. (2026). Imprisoned independence: The oligarchs' victory in dictating democratic practices in Indonesia. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1798302>
- Independent, S. (2026). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *14*(1), 123–150. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.2516>
- Indrawan, J., Yuliandri, P., & Sciences, P. (2025). Oligarchy and dynastic politics in Indonesia, *8*(1), 28–42.
- Jebabun, A. (2024). Autocratic legalism in the 2024 elections: Distortions of the rule of law in Indonesia's democracy. <https://doi.org/10.33541/sp.v26i1.7001>
- Jend, J., & Subroto, G. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi, *18*(2), 173–189.
- Margiansyah, D. (2024). The rise of anti-oligarchy and its limits in backsliding Indonesia, *1–15*.
- Noor, M., & Hidayaturrahman, M. (2025). Political clientelism in presidential elections: Voting behaviour and social assistance, *177–192*. <https://doi.org/10.22146/jsp.94625>
- Politik, J. W. (2026). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *11*(2), 333–346.
- Rohmah, E. I. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki: Telaah pemikiran W. A. Bonger. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, *16*(1), 1–12. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>

- Sherillia, A., Ramadhani, P. N., Ramadhani, G. A., & Santoso, R. (2026). Rethinking state theory: Addressing political oligarchy and dynastic power in Indonesia. *Review of Law and Social Justice*, 2(2), 59–69. <https://doi.org/10.64780/rolsj.v2i2.217>
- Siddha, A. (2024). Integrity and election-winning in Indonesia: How to challenge democracy amidst the oligarchy. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 152–163. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i2.42530>
- Situmeang, D. M., Simangunsong, R. T., & Simbolon, N. (2026).
- Widiyahseno, B., Hilman, Y. A., & Wibawa, S. (2026). Democratic decay by design: How political dynasties rewrite the rules of power in Indonesia. <https://doi.org/10.1007/s44216-026-00076-w>